

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM ZONASI

Sawal Hidayat¹, Wahira², Ahlun Ansar³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

Email: sawalhidayat99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak positif dan negatif kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi serta menganalisis kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 sebagai respons terhadap permasalahan zonasi. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur terhadap 43 sumber berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi, dan regulasi pendidikan periode 2018–2025. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem zonasi berdampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, efisiensi biaya karena jarak domisili, distribusi siswa yang lebih merata, serta meningkatnya partisipasi masyarakat lokal. (2) Kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan kualitas antar sekolah, manipulasi domisili, lemahnya sosialisasi kebijakan, dan terpinggirkannya siswa berprestasi. (3) Sebagai respons, kebijakan SPMB 2025 hadir dengan pendekatan yang lebih akuntabel melalui empat jalur penerimaan: domisili administratif, afirmasi, prestasi, dan mutasi. SPMB juga memberi otonomi kepada daerah, serta menerapkan verifikasi digital dan integrasi data Dukcapil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem zonasi memberikan dasar pemerataan pendidikan, namun SPMB diharapkan mampu mengatasi ketimpangan dan mewujudkan penerimaan siswa yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: PPDB, Sistem Zonasi, Dampak Kebijakan, SPMB 2025, Pemerataan Pendidikan.

ABSTRACT

The This study aims to examine the positive and negative impacts of the student admission policy (PPDB) based on the zoning system and to analyze the 2025 New Student Admission System (SPMB) policy as a response to issues arising from its implementation. The research adopts a literature review approach by analyzing 43 sources, including scientific journals, academic articles, theses, and educational regulations published between 2018 and 2025. The data were analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that (1) the zoning system positively contributes to equal access to education, cost efficiency due to proximity

of residence, more balanced student distribution among schools, and increased community involvement in local schools. (2) However, the policy also brings negative impacts such as disparities in school quality, address manipulation, lack of effective socialization, and the neglect of high-achieving students. (3) In response, the 2025 SPMB policy offers a more accountable approach through four admission pathways: administrative domicile, affirmative, achievement-based, and transfer. SPMB also grants greater autonomy to regions and implements digital verification and integration with population data (Dukcapil). This study concludes that while the zoning system has laid the groundwork for equitable education, the SPMB policy is expected to address quality disparities and promote a more fair and transparent student admission process.

Keywords: PPDB, Zoning System, Policy Impact, SPMB 2025, Educational Equity.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan layanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi hadir sebagai strategi pemerintah untuk menghapus diskriminasi, mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendistribusikan siswa secara merata ke seluruh sekolah.¹

Namun, dalam pelaksanaannya, sistem zonasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas antar sekolah, manipulasi domisili, dan kurangnya infrastruktur penunjang. Resistensi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap “non-favorit” serta lemahnya sosialisasi kebijakan turut memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap sistem ini. Penelitian Diki Darmawan dan Shevia Dwi Diantari (2024) mengungkapkan masih banyaknya ketimpangan dalam implementasi zonasi akibat praktik manipulasi data dan ketidakmerataan fasilitas.² Penelitian Wahyuni (2023) juga menemukan ketimpangan distribusi sekolah serta lemahnya pengawasan administratif.³

¹ Handayani, W. O., Purwanto, A., & Veriansyah, I. (2020). *Analisis Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak*.

² Diki Darmawan & Shevia Dwi Diantari. (2024). *Evaluasi Program PPDB pada Sistem Zonasi Menggunakan Model CIPP, Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 223–240.

³ Wahyuni, D. (2023). *Permasalahan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Jalur Zonasi*.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, Kementerian Pendidikan memperkenalkan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini menghadirkan pendekatan baru yang berbasis verifikasi data administratif, digitalisasi proses seleksi, serta pembagian jalur penerimaan menjadi empat kategori: domisili administratif, afirmasi, prestasi, dan mutasi.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif dan negatif kebijakan PPDB berbasis zonasi serta menelaah respon kebijakan SPMB 2025 sebagai upaya perbaikan sistem. Penelitian juga mengkaji pro dan kontra di masyarakat untuk memberikan gambaran yang lebih reflektif dan komprehensif terhadap arah kebijakan penerimaan siswa baru di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data literatur, seperti buku teks, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti secara sistematis menelusuri dan menganalisis sumber-sumber terdokumentasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai fenomena yang sedang dikaji. Sejalan dengan hal tersebut, Fadli menegaskan bahwa metode kualitatif deskriptif memiliki sifat induktif yang menitikberatkan pada perspektif subjek penelitian sehingga memungkinkan penggalan data secara mendalam dan kontekstual. Adapun tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah menyusun deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁵

Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁶ Oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tekkin pengumpulan data literatur.

⁴ Pancawati, M. D. (2025). *Penyempurnaan Sistem Zonasi Sekolah Sesuai Harapan Publik*.

⁵ Muhammad Fadli. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2020.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Dampak Positif Kebijakan PPDB Zonasi**

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB memiliki beberapa dampak positif yang mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur, berikut poin-poin dampak positif yang ditemukan:

1. Pemerataan Akses Pendidikan

Sistem zonasi membuka akses lebih luas bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah negeri. Hal ini memungkinkan siswa dari keluarga menengah ke bawah dapat mengakses sekolah berkualitas tanpa harus bersaing secara ketat dengan siswa dari luar zona.⁷

2. Efisiensi Biaya Pendidikan

Dengan sistem zonasi, siswa tidak perlu bersekolah jauh dari tempat tinggal. Pengeluaran untuk transportasi dan biaya hidup dapat ditekan, sehingga membantu keluarga dalam menekan beban biaya pendidikan.⁸

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal

Masyarakat setempat menjadi lebih terlibat dalam kegiatan sekolah karena anak-anak mereka diterima di sekolah terdekat. Hal ini memperkuat ikatan sosial antara sekolah dan komunitas.⁹

4. Pendistribusian Siswa Secara Merata

Sistem zonasi membantu menyebarkan jumlah peserta didik secara merata ke sekolah-sekolah di satu wilayah. Hal ini mengurangi beban sekolah favorit yang sebelumnya dipenuhi oleh siswa dari berbagai daerah.¹⁰

5. Penguatan Peran Sekolah Non-Favorit

Sekolah yang sebelumnya kurang diminati mulai mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Hal ini menjadi stimulus untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.¹¹

⁷ Ulfa & Fauzan. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah*; Risna. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan*.

⁸ Iriany, dkk. (2020). *Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Garut*; Fionita. (2021). *Implementasi Kebijakan PPDB Jalur Zonasi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi*.

⁹ Putri, dkk. (2023). *Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi*; Wijaya, dkk. (2020). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB SMP Kabupaten Langkat*.

¹⁰ Dwi Anggraini, dkk. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya*; Ahmad. (2021). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta*

¹¹ Sari & Dewi. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan*; Solikha & Mustofa. (2024). *Implikasi dan Strategi Sekolah Unggulan terhadap Sistem Zonasi*.

Dampak Negatif Kebijakan PPDB Zonasi

Meskipun membawa sejumlah manfaat, sistem zonasi juga menimbulkan beberapa persoalan yang kompleks. Dampak negatif berikut muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan pelaksanaan kebijakan:

1. Ketimpangan Kualitas Antar Sekolah
Siswa yang tinggal dekat dengan sekolah mungkin harus menerima kualitas pendidikan yang lebih rendah jika sekolah tersebut kurang sarana, prasarana, atau tenaga pengajar yang memadai.¹²
2. Manipulasi Domisili
Dalam praktiknya, ditemukan banyak kasus manipulasi alamat domisili hanya agar siswa dapat diterima di sekolah yang dianggap favorit. Ini menimbulkan persoalan etika dan keadilan dalam seleksi.¹³
3. Lemahnya Sosialisasi dan Implementasi Awal
Pada awal penerapan sistem zonasi, banyak sekolah, guru, dan masyarakat belum memahami secara utuh mekanisme dan tujuan kebijakan ini. Hal ini menyebabkan penolakan, kebingungan, dan pelanggaran prosedur.¹⁴
4. Terpinggirkannya Siswa Berprestasi
Karena seleksi berdasarkan jarak domisili, siswa yang berprestasi tinggi tapi berada di luar zona sekolah yang mereka tuju sering kali tidak diterima. Ini memunculkan kritik karena dianggap mengabaikan prinsip meritokrasi.¹⁵
5. Overkapasitas Sekolah Tertentu
Beberapa sekolah yang berada di tengah pemukiman padat mengalami kelebihan kapasitas siswa karena banyaknya pendaftar yang tinggal dalam zona. Hal ini berdampak pada kualitas layanan dan proses pembelajaran.¹⁶
6. Belum Meratanya Fasilitas dan Guru Berkualitas
Zonasi tidak disertai dengan distribusi sumber daya yang merata. Banyak sekolah non-favorit masih kekurangan guru berkualitas, laboratorium, atau

¹² Dwi Anggraini dkk. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya*; Gabrielle & Santoso. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan dalam Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Selatan*.

¹³ Maesarini. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di Indonesia*; Rabbani dkk. (2023). *Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan*.

¹⁴ Ishak. (2020). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB SMA di Pekanbaru*; Launuha dkk. (2021). *Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kota Gorontalo*.

¹⁵ Rabbani dkk. (2023). *Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan*; Solikha & Mustofa. (2024). *Implikasi dan Strategi Sekolah Unggulan terhadap Sistem Zonasi*.

¹⁶ Ahmad. (2021). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta*; Iriany dkk. (2020). *Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Garut*.

ruang belajar memadai, sehingga pemerataan akses belum sejalan dengan pemerataan mutu.¹⁷

Respons Kebijakan: Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem zonasi, Kementerian Pendidikan merancang kebijakan baru berupa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. SPMB mencoba mengakomodasi kebutuhan akan keadilan, transparansi, serta memperbaiki kelemahan teknis sistem sebelumnya. Respons kebijakan ini terlihat dalam beberapa poin berikut:

1. Diversifikasi Jalur Penerimaan

SPMB 2025 menerapkan empat jalur seleksi, yaitu jalur domisili administratif, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Hal ini memberi ruang yang lebih luas bagi siswa dengan latar belakang berbeda untuk mengakses pendidikan.¹⁸

2. Verifikasi Domisili secara Digital

Untuk mencegah praktik manipulasi alamat, SPMB menggunakan sistem verifikasi domisili berbasis data kependudukan (Dukcapil). Proses ini memperkuat keabsahan data dan mendorong transparansi seleksi.¹⁹

3. Pemberian Otonomi kepada Daerah

SPMB memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Kebijakan ini mendorong respons kebijakan yang lebih kontekstual.²⁰

4. Penguatan Jalur Prestasi dan Afirmasi

Jalur prestasi menjadi solusi bagi siswa dengan pencapaian akademik maupun non-akademik agar tetap mendapatkan kesempatan, meskipun tidak berada dalam zona sekolah tujuan. Sementara itu, jalur afirmasi ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau kelompok rentan.²¹

¹⁷ Risna. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan*; Widyastuti. (2020). *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik*.

¹⁸ Maharani & Sofiyanti. (2025). *Transformasi Seleksi Peserta Didik dari PPDB ke SPMB Tahun 2025*; Mardatila dkk. (2025). *Optimizing the Management of the New Student Admission System (SPMB)*.

¹⁹ Rusmini & Iwan Ristanto. (2025). *Kebijakan Akses Pendidikan Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Wonogiri 2025*.

²⁰ Mardatila dkk. (2025). *Optimizing the Management of the New Student Admission System (SPMB)*.

²¹ Maharani & Sofiyanti. (2025); Solikha & Mustofa. (2024). *Implikasi dan Strategi Sekolah Unggulan terhadap Sistem Zonasi*.

5. Integrasi dengan Data Dukcapil dan Data Pendidikan Nasional
Sistem SPMB memanfaatkan integrasi data antar lembaga untuk memastikan validitas dan efisiensi dalam seleksi peserta didik. Hal ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.²²
6. Penyempurnaan Regulasi dan Pedoman Teknis
SPMB juga hadir dengan regulasi yang lebih terstruktur dan detail dibandingkan kebijakan zonasi sebelumnya. Ini mencakup petunjuk teknis, tenggat waktu, dan penguatan fungsi pengawasan pelaksanaan di lapangan.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam PPDB memberikan dampak yang kompleks terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Dari sisi positif, zonasi mampu mendorong pemerataan akses pendidikan, mengurangi biaya transportasi, serta memperkuat keterlibatan masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketimpangan mutu sekolah, praktik manipulasi domisili, resistensi terhadap penghapusan sekolah favorit, serta kurang optimalnya jalur afirmasi bagi kelompok rentan.

Sebagai bentuk evaluasi dan penyempurnaan, kebijakan SPMB 2025 hadir dengan pendekatan yang lebih adaptif. Kebijakan ini menerapkan sistem multi-jalur (domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi) serta teknologi verifikasi berbasis data Dukcapil dan geospasial untuk menjamin keadilan dan transparansi. SPMB juga mendorong penguatan kapasitas sekolah-sekolah pinggiran, sosialisasi menyeluruh, serta partisipasi publik dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2021). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta*.
- Darmawan, D., & Diantari, S. D. (2024). Evaluasi Program PPDB pada Sistem Zonasi Menggunakan Model CIPP. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 223–240.
- Dwi Anggraini, dkk. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya*.
- Fadli, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

²² Dwi Anggraini dkk. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya*.

²³ Pancawati, M. D. (2025). *Penyempurnaan Sistem Zonasi Sekolah Sesuai Harapan Publik*; Mardatila dkk. (2025).

- Fionita. (2021). *Implementasi Kebijakan PPDB Jalur Zonasi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi*.
- Gabrielle, & Santoso. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan dalam Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Selatan*.
- Handayani, W. O., Purwanto, A., & Veriansyah, I. (2020). *Analisis Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak*.
- Iriany, dkk. (2020). *Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Garut*.
- Ishak. (2020). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB SMA di Pekanbaru*.
- Launuha, dkk. (2021). *Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kota Gorontalo*.
- Maesarini. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di Indonesia*.
- Maharani, & Sofiyanti. (2025). *Transformasi Seleksi Peserta Didik dari PPDB ke SPMB Tahun 2025*.
- Mardatila, dkk. (2025). *Optimizing the Management of the New Student Admission System (SPMB)*.
- Pancawati, M. D. (2025). *Penyempurnaan Sistem Zonasi Sekolah Sesuai Harapan Publik*.
- Putri, dkk. (2023). *Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi*.
- Rabbani, M. S., dkk. (2023). *Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan*.
- Risna. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan*.
- Rusmini, & Ristanto, I. (2025). *Kebijakan Akses Pendidikan Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Wonogiri 2025*.
- Sari, & Dewi. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan*.
- Solikha, & Mustofa. (2024). *Implikasi dan Strategi Sekolah Unggulan terhadap Sistem Zonasi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, & Fauzan. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah*.
- Wahyuni, D. (2023). *Permasalahan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Jalur Zonasi*.
- Wijaya, dkk. (2020). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB SMP Kabupaten Langkat*.
- Widyastuti. (2020). *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik*.